

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Bagir Manan. 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Budi Rizki Husin. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc.
- Congressional Research Service. 2020. *Military Courts-Martial Under the Military Justice Act of 2016*. Washington: Library of Congress.
- Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Edward Omar Sharif Hiariej. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PT Erlangga.
- Firmansyah Adibin. *et al.* 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Gustav Radbruch. 2006. *Filsafat Hukum: Tiga Teori Dasar Hukum*. (terjemahan Nuraini Soetardjo). Bandung: Nuansa.
- HR Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeserannya Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: PT Kontitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Laporan Tahunan KPK 2019: Korupsi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: KPK RI.
- Mardjono Reksodipetro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Mukhsan. 1992. *Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2001. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- \_\_\_\_\_. *et al.* 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Renggong Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simon Butt. 2012. *Corruption and Law in Indonesia*. London: Routledge.
- Sujono. 2023. *Peradilan Koneksitas: Problematik dan Prospektif*. Jakarta Barat: Campustaka.

## Artikel Jurnal

- Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim. 2021. *Problematis Definisi Harta Pailit Dalam Kepailitan dan PKPU Untuk Mencapai Kepastian Hukum*. Verstek Jurnal Hukum Acara. Volume 7 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Jawa Tengah.
- Agus Setiyawan Dwi Arianto. 2020. *Karakteristik Pengawasan Terhadap Penyidik Militer Dalam Proses Peradilan Pidana Militer*. Media Iuris. Volume 3 Nomor 3. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Angel Nikhio, et al. 2023. *Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, Indigenous Knowledge. Volume 2 Nomor 6. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Asep Satria Purnama, Hartana, dan Ismail. 2024. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5 Nomor 2. Setara. Jakarta Pusat.
- Deasy Franty Abdulkarim. 2023. *Kedudukan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Journal Scientia De Lex. Volume 10 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tomohon.
- Dwi Novantoro. 2025. *Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Adijaya Jurnal Multidisiplin. Volume 3 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.
- Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga. 2021. *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 1 Nomor 1. Universitas Negeri Medan. Deli Serdang.
- Kartika Widya Utama. 2025. *Eksistensi Good Governance Principle Sebagai Pedoman Kebijakan Administrasi Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Progresif. Volume 12 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Margaret Pangaribuan. et al. 2021. *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Nomor 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Volume 1 Nomor 3. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Medan.
- Melani Ema Gratsia. et al. 2023. *Keabsahan Penempatan Anggota TNI dalam Menduduki Jabatan Sipil*. Bhirawa Law Journal. Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Malang.
- Mohammad Mahmudi dan Ludfi. 2023. *Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas antara KPK dan TNI*. Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan. Volume 2 Nomor 1. HUNILA. Jayapura.
- Muhammad Bacharudin Jusuf, et al. 2023. *Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral. Volume 1 Nomor 2. Forikami. Bandung.
- Muhammad Reyhan Farabi, et al. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Sumbang 12 Journal. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sumatera Barat.
- Mutia Kardina dan Aldri Frinaldi. 2023. *Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Volume 1 Nomor 4. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Padang.
- Rosmala Dewi Sakti. 2016. *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Jurnal Hukum. Volume 10 Nomor 2. Progresif. Bangka Belitung.

- Syifa Roudhotul Aulia. et al. 2025. *Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata*. Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik. Volume 4 Nomor 1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Banten.
- Very Pahala Sijabat. et al. 2024. *Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum*. Rewang Recang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 5 Nomor 7. Universitas Prima Indonesia. Medan.
- Vito Angga Dinata. 2024. *Analisa Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota TNI yang Menduduki Jabatan Sipil*. Jurnal Kertha Negara. Volume 12 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- Yusuf Wibisono. 2024. *Analisis Perkembangan Peradilan Koneksitas di Indonesia dan Komparasi Pengaturan Peradilan Militer dalam Kasus Korupsi di Indonesia, Amerika, Prancis*. Jurnal Darma Agung. Volume 32 Nomor 6. Universitas Darma Agung. Medan.

### **Skripsi**

- Amanah Abdi Collina. 2024. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI yang Menduduki Jabatan Sipil*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

### **Sumber Internet**

- BBC News Indonesia. "TNI menahan Kepala Basarnas dan menetapkan status tersangka setelah KPK minta maaf". <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq344l2xxv0o>. diakses pada 22 Mei 2025. pukul 16.08 wita.
- Chambers and Partners. "Anti-Corruption 2025". [https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/anti-corruption-2025/south-korea?utm\\_source=chatgpt.com](https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/anti-corruption-2025/south-korea?utm_source=chatgpt.com). diakses pada 8 Juli 2025. Pukul 19.20 wita.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "TPK Berupa Suap Pengadaan Barang dan Jasa Di Basarnas (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan) Tahun 2021 s/d 2023". <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-berupa-suap-pengadaan-barang-dan-jasa-di-basarnas-badan-nasional-pencarian-dan-pertolongan-tahun-2021-sd-2023>. diakses pada 22 Mei 2025. pukul 16.15 wita.
- Kompas. "Aniaya Warga Aceh Hingga Tewas, Oknum Paspampres Pura-pura Jadi Polisi dan Peras Korban". <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/28/19414861/aniaya-warga-aceh-hingga-tewas-oknum-paspampres-pura-pura-jadi-polisi-dan>. diakses pada tanggal 13 Juli 2025. pukul 15.35 wita.
- Tirto. "Respon Panglima Andika Terkait 3 Anggota TNI Dalam Kasus Nagreg". <https://tirto.id/respons-panglima-andika-terkait-3-anggota-tni-dalam-kasus-nagreg-gmDB>. diakses pada tanggal 13 Juli 2025. pukul 15.52 wita.
- Liputan6. "Kejagung: Ada Keterlibatan TNI-Sipil, Kasus Satelit Kemhan Ditangani Secara Koneksitas". <https://www.liputan6.com/news/read/4886781/kejagung-ada-keterlibatan-tni-sipil-kasus-satelit-kemhan-ditangani-secara-koneksitas>. diakses pada tanggal 13 Juli 2025, pukul 16.08 wita.